



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur sepanjang tahun 2022 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021-2026.

Selain itu, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan KESBANGPOL Tahun 2022.

Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Badan KESBANGPOL secara umum target yang ditetapkan telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan

kualitas kinerja di masa mendatang. Sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, saya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini. Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.

Malili, Januari 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Tk. I

NIP. 19710502 199208 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Luwu Timur, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun yaitu *Meningkatnya Peran FKUB dan Membangun Kerukunan Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya*. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran *Pertama adalah Tercipnya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis; Kedua : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum; Ketiga : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan OPD*. Dari 3 (tiga) sasaran tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja.

Program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur 2021-2026, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan

politik yang demokratis di Kabupaten Luwu Timur. Capaian sasaran strategis Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur secara ringkas dapat digambarkan berikut :

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALI SASI	CAPAI AN	ALOKASI	REALISASI	CAPAI AN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya a Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis		Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	80,50%	100%	124%	890.806.240,-	889.765.605	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter	95%	100%	105%	151.804.590,-	151.209.010	99,61%
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95%	100%	105%	308.608.365,-	308.568.310	99,99
	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	95%	95%	100%	430.393.285	429.988.285	99,91%
Meningkat nya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	79,18%	80,46%	101%	792.953.685	792.569.685	99,95%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95%	100%	105%	752.192.325	751.993.315	99,97%
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	100%	100%	40.761.370	40.576.370	99,55
Meningkat nya Akuntabil its Kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100%	100%	100%	2.436.448.914	2.405.345.739	98,72
Total Belanja						4.120.208.839	4.087.681.029	99,21

Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- b. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh, efektif, dan efesien.
- c. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

	3.2.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	45
	3.2.2. Sasaran Strategi II	45
	3.2.1.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.....	46
	3.2.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu	47
	3.2.2.3. Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
	3.2.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	57
	3.2.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	58
	3.2.3. Sasaran Strategi III	58
	3.2.3.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.....	59
	3.2.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu	59
	3.2.3.3. Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	71
	3.2.3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	78
	3.2.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	79
	3.2. Realisasi Anggaran	80
BAB IV	PENUTUP	89
	4.2. Kesimpulan	89
	4.1. Saran	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	7
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi SDM (PNS/Upah Jasa) berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.2.	Komposisi SDM (PNS/Upah Jasa) berdasarkan Jenis Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	9
Tabel 1.3.	Komposisi Pegawai (PNS) berdasarkan Jabatan Struktural / Eselon	10
Tabel 1.4.	Komposisi PNS/Upah Jasa berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang	11
Tabel 1.5.	Daftar Sarana dan Prasarana Kantor dan kondisinya	12
Tabel 1.6.	Daftar Kendaraan Dinas/Operasional dan kondisinya	13
Tabel 1.7.	Daftar Jenis Barang dan kondisinya	13
Tabel 2.1.	Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .	20
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	22
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	22
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan.....	23
Tabel 2.5.	Pagu Anggaran Perubahan.....	25
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	28
Tabel 3.3.	Realisasi Indikator Sasaran I Tahun 2022.....	30
Tabel 3.4.	Jumlah Konflik yang Terjadi Tahun 2020-2022.....	32
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis I	39
Tabel 3.6.	Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2022.....	46
Tabel 3.7.	Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 .	48
Tabel 3.8.	Data Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022.....	49
Tabel 3.9.	Data Ormas/LSM/OKP/Kelompok Tani/Kelompok Nelayanan/Rumah Ibadah Terdaftar Tahun 2022.....	51
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis II	54
Tabel 3.11.	Realisasi Indikator Sasaran III Tahun 2022.....	59

Tabel 3.12.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2021.....	59
Tabel 3.13.	Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2017-2022.....	61
Tabel 3.16.	Realisasi Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.....	71
Tabel 3.17.	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis III	72
Tabel 3.18.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	81
Tabel 3.19.	Realisasi Keuangan Tahun 2022	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Komposisi SDM (PNS/Upah Jasa) berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Grafik 1.2. Komposisi SDM (PNS/Upah Jasa) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	10
Grafik 1.3. Jabatan Struktural berdasarkan Jenis Kelamin .	11
Grafik 1.4. Komposisi PNS/Upah Jasa berdasarkan Penempatan Kerja	12
Grafik 3.1. Persentase Capaian Sasaran Strategis I	30
Grafik 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Konflik Tahun 2020-2022	31
Grafik 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Persentase Partisipasi Pemilih Tahun 2020-2022	47
Grafik 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran III	60
Grafik 3.7. Realisasi Anggaran 2022	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021 - 2026 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan suatu system yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Luwu Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44270);
3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

1.4. GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL

1.4.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUD No.23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pada poin (7) pasal 25 UU no.23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.” Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi, kedudukan. Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari

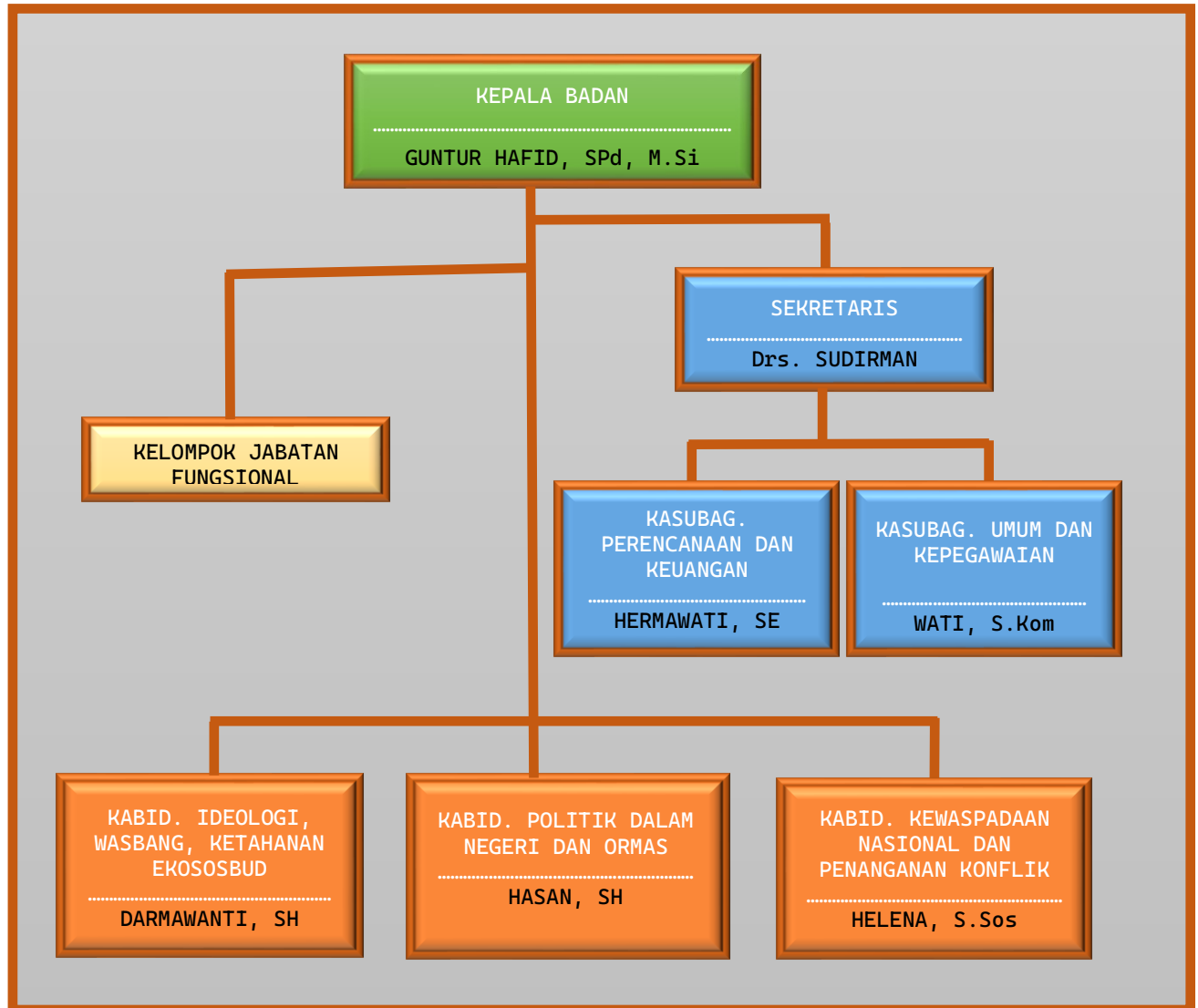
1. Kepala Badan,
2. Sekretariat; membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama ;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris, kepala sub bagian dan para Kepala Bidang sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi berikut

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2021



1.4.3. SUMBER DAYA KESBANGPOL

1.4.3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 didukung oleh aparat / personil

sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri 12 (dua belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 (dua belas) Non-PNS atau tenaga upah jasa.

Komposisi Pegawai/Upah Jasa tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 14 (empat belas) orang perempuan atau (58 %) dan 10 (sepuluh) orang laki-laki atau (42%). Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 18% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel dibawah ini

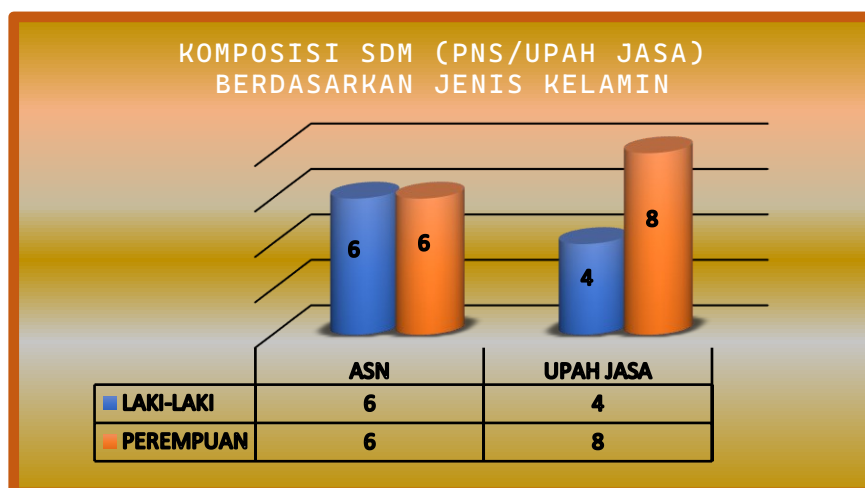
Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia (ASN/Upah Jasa)
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (Orang)	Jumlah Pegawai (%)
1	Laki-Laki	10	42
2	Perempuan	14	58
Total		24	100%

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Tahun 2022

Secara grafik dapat digambarkan pada

Grafik 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia (PNS/Upah Jasa)
Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan kualifikasi pendidikan, komposisi sumber daya manusia (pegawai/upah jasa) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Komposisi Sumber Daya Manusia (PNS/Upah Jasa)
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

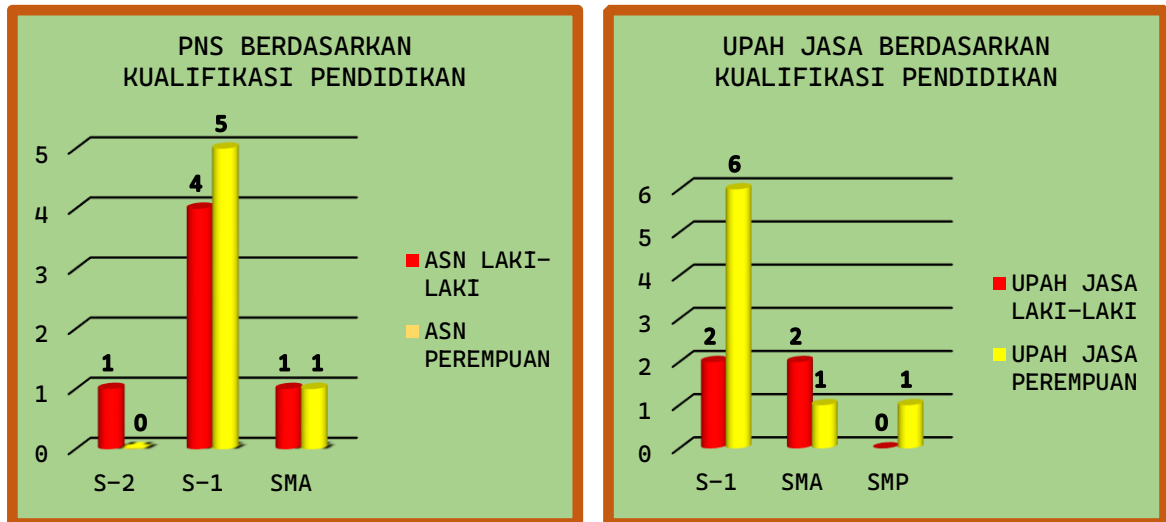
No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	IV	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
2	III	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4
3	II	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
4	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPAH JASA														
	ADMINISTRASI/OPERATOR	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	7
	SECURITY	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	SOPIR	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah		1	0	6	11	-	-	3	2	-	1	-	-	10	14
		1		17		-		5		1		-		24	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Tahun 2022

Dari tabel diatas, jumlah pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Upah Jasa dari segi pendidikan cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang terdiri tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang (4,2 %), S1 sebanyak 17 orang (70,8%), SLTA sebanyak 5 orang (20,8%), dan SLTP sebanyak 1 orang (4,2%). Secara grafik dapat digambarkan pada

Grafik 1.2

Komposisi Sumber Daya Manusia (PNS / Upah Jasa)
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Selanjutnya komposisi pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural / Eselonisasi dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel. 1.3

Komposisi Pegawai (ASN)
Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

No.	Jabatan Struktural / Eselon	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	II b	1	14
2.	III a	1	14
3.	III b	3	43
4.	IV a	2	29
Jumlah		7	100

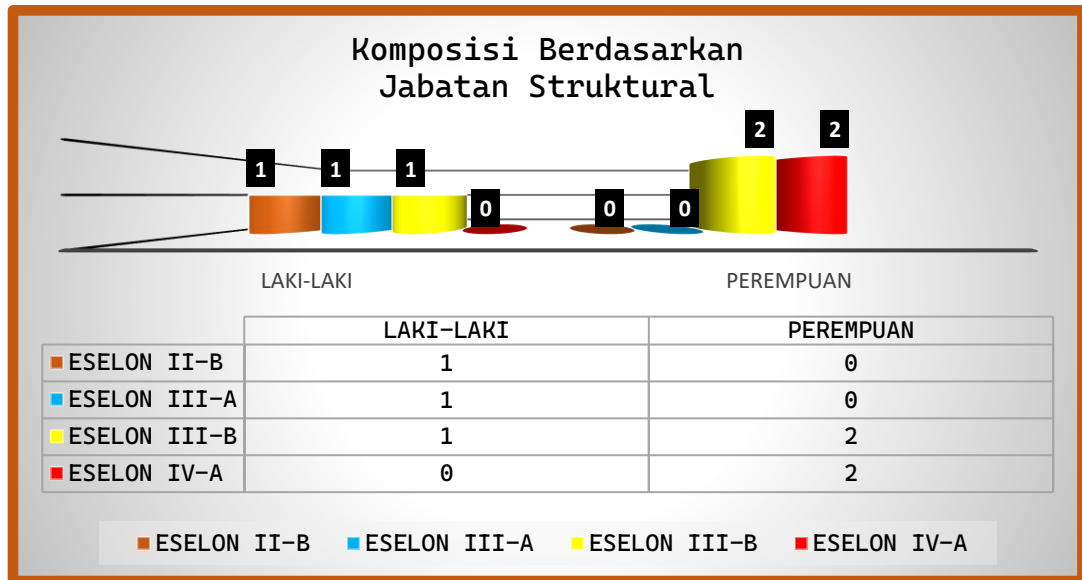
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol 2022

Dari data diatas, komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural telah sesuai dengan jumlah jabatan yang ada pada struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yaitu 1 (satu) orang Pejabat Eselon II-B, 1 (satu) orang pejabat eselon III-A, 3 (tiga) orang pejabat

eselon III-B dan 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV-A. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut

Grafik. 1.3

Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin



Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.4.

Komposisi PNS/Upah Jasa
Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang

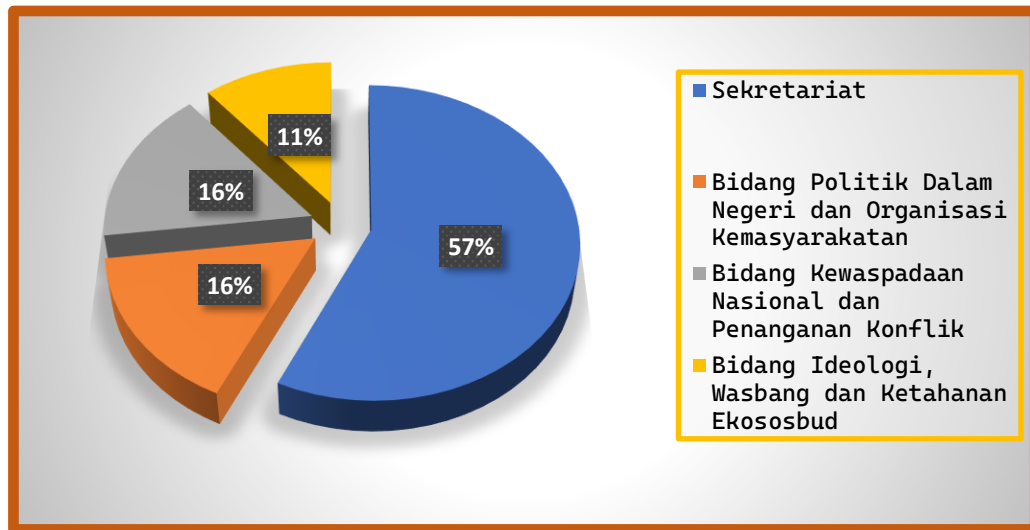
No.	Bidang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Sekretariat	11	57
2.	Bidang Politik Dalam Negeri	3	16
3.	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	3	16
4.	Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekososbud	2	11
Jumlah		19	100

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian Kesbangpol 2022

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 57% PNS/Upah Jasa berada di sekretariat, sedangkan sisanya pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan

pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik. 1.4
Komposisi Pegawai (PNS/Upah Jasa)
Berdasarkan Penempatan Kerja



1.4.3.2. SARANA DAN PRASARANA

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kondisi sarana dan prasarana kerja yang sekaligus asset perlengkapan yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 1.5
Daftar Sarana/Prasarana Kantor dan Kondisinya
Per 31 Desember 2022

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Ruang Kepala Badan	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Ruang Sekretaris	1 Unit	Kondisi Baik
4.	Ruang Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1 Unit	Kondisi Baik

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
5.	Ruang Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1 Unit	Kondisi Baik
6.	Ruang Kabid Ideologi, Wasbang dan Ketahanan EKOSOSBUD	1 Unit	Kondisi Baik
7.	Ruang Kasubag REN-KEU	1 Unit	Kondisi Baik
8.	Ruang Kasubag UM-PEG	1 Unit	Kondisi Baik
9.	Ruang/Aula Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
10.	Kamar Kecil (WC)	4 Unit	Kondisi Baik
11.	Ruang Dapur	1 Unit	Kondisi Baik
12.	Ruang Tamu (Front Office)	1 Unit	Kondisi Baik
13.	Gudang	1 Unit	Kondisi Baik
14.	Ruang Ibadah (Mushallah)	1 Unit	Kondisi Baik

Tabel. 1.6
Daftar Kendaraan Dinas/Operasional dan Kondisinya
Per 31 Desember 2022

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Motor	3 Unit	Kondisi Baik
	Jumlah	4 Unit	

Tabel. 1.7
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya
Per 31 Desember 2021

No	Jenis Barang	Keadaan		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Lemari	6	–	6 Unit
2.	White Board	2	–	2 Unit
3.	Meja Rapat	1	–	1 Unit
4.	Meja Komputer	2	–	2 Unit
5.	Meja Kerja	23	–	23 Unit

No	Jenis Barang	Keadaan		Jumlah
		Baik	Rusak	
6.	Kursi Tunggu	2	–	2 Unit
7.	Kursi Kerja/Biro	15	–	15 Unit
8.	Kursi Rapat	50	–	50 Unit
9.	Kipas Angin	3	–	3 Unit
10.	LCD	1	–	1 Unit
11.	AC	10	–	10 Unit
12.	Dispenser	1	1	2 Unit
13.	Wireles	1	–	1 Unit
14.	Filling Kabinet	8	–	8 Unit
15.	Brankas	1	–	1 Unit
16.	Televisi	2	–	2 Unit
17.	UPS	0	3	3 Unit
18.	Kamera	1	–	1 Unit
19.	Gambar Presiden/Wakil	2	–	2 Unit
20.	Komputer	3	–	3 Unit
21.	Notebook	13	–	13 Unit
22.	Printer	11	–	11 Unit
23.	Hardisk	2	–	2 Unit
24.	Layar LCD	1	–	1 Unit
25.	Kulkas	2	–	2 Unit
26.	Sofa	2	–	2 Set
27.	Drone	1	–	1 Set

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Luwu Timur adalah kabupaten yang mempunyai ciri khas kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Bantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang demokratis dan berwawasan kebangsaan. Secara umum terdapat beberapa masalah / isu-isu strategis yang akan dihadapi dimasa kini dan masa akan datang :

1. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, ras dan agama;
2. Adanya kesenjangan antar etnik/etnis yang ada diwilayah Kabupaten Luwu Timur;
3. Lunturnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di berbagai lapisan masyarakat yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa dan konflik sosial;
4. Rentannya Konflik antar umat beragama di masyarakat yang diakibatkan oleh fanatisme agama dan adanya kelompok - kelompok atau organisasi yang membawa paham radikal yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat;
5. Masih adanya warna negara asing yang keluar masuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur belum memiliki data yang lengkap;
6. Adanya Lembaga / organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktivitas / kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, terutama anak-anak usia sekolah dan remaja;
8. Teknologi informasi yang semakin canggih menyebabkan banyaknya berita-berita hoax beredar di masyarakat;
9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
10. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Renstra 2021 - 2026 (Renstra hasil revidi) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target Indikator Kinerja Utama (IKU) lima tahun yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dari aspek :

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan rencana anggaran yang akan digunakan dan yang anggaran telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV.PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah dan solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi keluaran (Output) dan hasil out comes/yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok mencakup Visi dan Misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1. Visi

Rumusan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur didasarkan pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana rumusan visi Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur merujuk kepada amanat visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dalam kalimat :

V I S I

”LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

Visi ini bermakna bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah daerah yang terus berbenah menjadi lebih maju pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya didalamnya.

2.1.2. Misi

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Misi pada nomor (6) yaitu

MISI - 6

**” MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS
PADA AGAMA DAN BUDAYA”**

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI RPJMD TAHUN 2021-2026 : “ KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”		
MISI – 6 : “ MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA AGAMA DAN BUDAYA”		
NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	1. Terciptanya kerukunan ummat beragama yang harmonis
		2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD

Sumber: Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

2.1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan strategi dan kebijakan yang digambarkan pada table berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI RPJMD TAHUN 2021-2026 : “ KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”			
MISI – 6 : “ MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA AGAMA DAN BUDAYA”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	1.Terciptanya kerukunan ummat beragama yang harmonis	Peningkatan pembinaan masyarakat yang religius dan toleransi dalam kehidupan beragama.	1. Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. 2. Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik. 3. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan & ketertiban masyarakat
	2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik Nasional dan lokal	Melakukan pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai Sakip	Peningkatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sumber : Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan ikhtisar rencana yang dicapai pada tahun 2022. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	TARGET
1.	Terciptanya kerukunan ummat beragama yang harmonis	Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	Jumlah konflik keagamaan yang terjadi dibagi jumlah konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi x 100%	Persen	80,50
2.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	Jumlah suara sah dibagi Jumlah daftar pemilih tetap x 100%	Persen	79,18
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	Nilai Sakip	Nilai	67

Sumber Data : Dokumen Renstra dan IKU Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

2.3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Bupati Luwu Timur selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PK) Anggaran Perubahan
Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	Persentase	80,50
2.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	Persentase	79,18

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	67

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	151.804.590,-	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	308.608.365,-	APBD
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	430.393.285,-	APBD
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	752.192.315,-	APBD
5.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	40.761.370,-	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.436.448.914,-	APBD
Jumlah		4.120.208.839,-	APBD

Sumber : Dok. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

2.4. PERENCANAAN ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022. Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami penambahan

anggaran, pagu sebesar Rp. 4.120.208.839,- (Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sama dengan pagu dianggaran pokok tahun 2022 hanya dilakukan pergeseran anggaran antar sub kegiatan. Adapun anggaran belanja perubahan 2022 sebagai berikut

Tabel 2.5
Pagu Anggaran Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2022

NO	BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	5
1	Belanja Operasi	3.918.681.470	95,11
	Belanja Pegawai	1.535.599.972	37,27
	Belanja Barang dan Jasa	1.610.637.363	39,09
	Belanja Hibah	772.444.135	18,74
2	Belanja Modal	201.527.369	4,89
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.807.369	3,93
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	24.720.000	0,60
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000	0,36
	Total	4.120.208.839	100

Sumber : DPA-P Badan Kesbangpol Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan yang termuat dalam RENSTRA 2021 – 2026

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	Persen	80,50	100	124
2.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	Persen	79,18	80,45	102
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	67	Belum Rilis	-

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. SASARAN STRATEGIS 1



Kerukunan antarumat beragama merupakan kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama, tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama. Peningkatan kerukunan beragama dan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat.

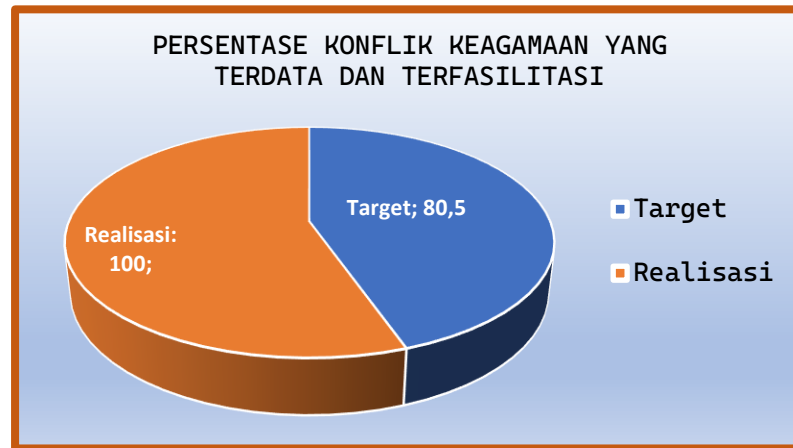
Memelihara ketentraman, ketertiban serta menumbuhkembangkan keharmonisan dimasyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Upaya Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan ketentraman di Kabupaten Luwu Timur melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik,

membangun system peringatan dini dan memelihara kondisi damai dalam masyarakat.

Berdasarkan Renstra 2021–2026, pencapaian sasaran startegis I dapat digambarkan pada grafik dibawah :

Grrafik 3.1



3.2.1.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” ditetapkan 1 (satu) indicator kinerja yaitu Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi”. Realisasid dan capaian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Sasaran I Tahun 2022
(dibandingkan target)

Sasaran I	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Konflik Keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	80,50%	100%	124%

Sumber : Badan Kesbangpol 2022

Dari table 3.3 diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dengan Indikator Sasaran Persentase Konflik Keagamaan yang terdata dan

terfasilitasi, di Tahun 2022 ini dinyatakan BERHASIL, hal ini ditunjukkan dengan realisasi sebesar 100% dari target pada tahun ini sebesar 80,50% yang berarti capaian kinerja untuk Indikator ini tercapai 124% (sangat tinggi).

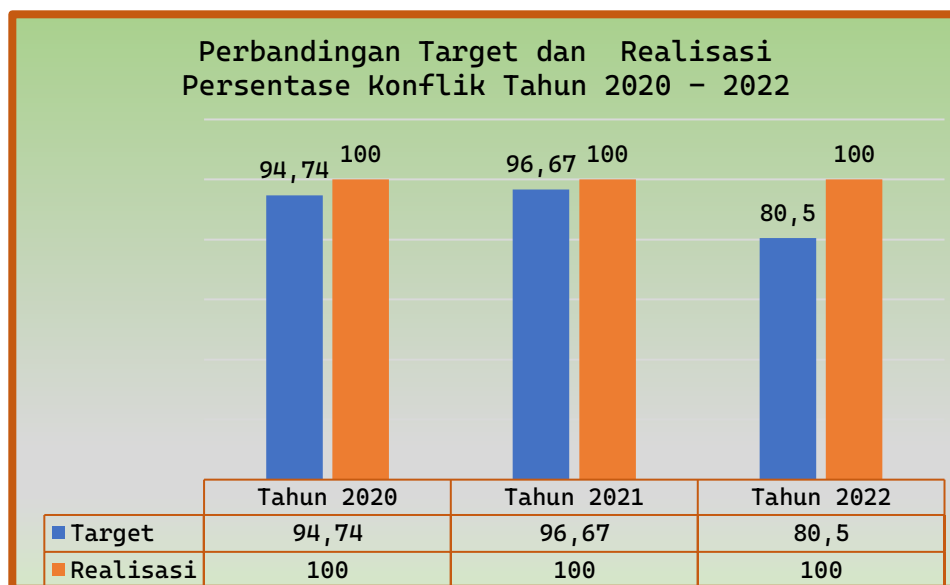
Pencapaian positif indikator sasaran Persentase Konflik Keagamaan yang Terdata dan Terfasilitasi tersebut diperoleh dari formulasi :

$$\text{Jumlah konflik Keagamaan yang Terjadi dibagi Jumlah konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi} \times 100\%$$

3.2.1.2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi capaian kinerja persentase konflik yang tertangani di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2



Dari grafik 3.2 tersebut kondisi realisasi angka persentase konflik sosial yang tertangani dan terdata menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2020–2022 persentase konflik yang tertangani dan terdata melampaui dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, bahwa peran aktif Badan Kesbangpol Luwu Timur dan instansi terkait lainnya

telah berhasil meredam potensi-potensi konflik yang ada di Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun.

Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau intarumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Jumlah konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur
per jenis konflik Tahun 2020 – 2022

No	Jenis Konflik	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Konflik Lahan	0 Kasus	3 Kasus	0 Kasus
2.	Konflik perbatasan	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
3.	Konflik Politik	3 Kasus	2 Kasus	0 Kasus
4.	Konflik Agama	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
5.	Konflik Suku	0 Kasus	2 Kasus	0 Kasus
6.	Kriminal	18 Kasus	25 Kasus	22 Kasus
7.	Aksi Demo	30 Kasus	29 Kasus	38 Kasus
Total		51 Kasus	59 Kasus	60 Kasus

Sumber : Bidang Wasnas dan Penangana Konflik Kesbangpol Luwu Timur

berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa konflik di kabupaten Luwu Timur secara umum hanya di dominasi oleh aksi kriminalitas dan aksi demonstrasi. Sedangkan untuk konflik suku dan Konflik agama 0 (nol)

kasus atau tidak pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, dan memelihara kondisi damai dalam masyarakat

Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya mengintensifkan dialog, koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait, kelompok masyarakat (alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda), membangun karakter bangsa, melestarikan nilai Pancasila dan kearifan local, Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila

Dengan indikator program persentase jumlah kebijakan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan terealisasi 100% dari target 95% dengan capaian kinerja 105%. Adapun formula indikatornya adalah Jumlah Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diamanahkan x 100%. Adapun kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diamanahkan dan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (2) bahwa Bupati bertanggungjawab terhadap peningkatan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pemahaman masyarakat Kabupaten Luwu Timur terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara. Dengan indikator kegiatan Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, terealisasi 100% dari target 95% dengan capaian kinerja 105%. Adapun kegiatan dibidang ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan dan direncanakan adalah kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan jumlah peserta 80 (delapan puluh) orang yang terdiri dari kelompok masyarakat dan Ormas/LSM se Kabupaten Luwu Timur. kegiatan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional, kegiatan Pembentukan Forum Kader Bela Negara (FKBN) serta kegiatan pemantauan dan koordinasi dibidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Adapun formulasi indikatornya adalah

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai Wawasan Kebangsaan

100%

1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan yang disusun. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 berdasarkan rencana kerja tahunan sebesar 3 Laporan dengan realisasi sebesar 3 Laporan (capaian kinerja 100% – sangat tinggi) yaitu laporan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; laporan data suku/etnis; laporan peningkatan kesadaran bela negara . Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula

Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan yang disusun

= 3 laporan

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sasaran program ini adalah meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya . Dengan indikator program Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan terealisasi 100% dari target 95% dengan capaian kinerja 105% (sangat tinggi). Adapun formula indikatornya adalah Jumlah Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya dibagi Jumlah Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang direncanakan x 100%. Untuk mengukur capaian kinerja program ini telah dilakukan sejumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yaitu pembentukan tim terpadu dan sosialisasi pencegahan, pemberantasan dan peredaran narkoba serta koordinasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator kegiatan ini adalah Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama. Dengan realisasi 100% dari target 95% dengan capaian kinerja 105% (sangat tinggi) Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dari kegiatan ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya}}{\text{Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya dalam 1 tahun}} = 100\%$$

Ditahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi pencegahan, pemberantasan dan peredaran narkoba (P4GN) dan precursor narkoba dengan target peserta sebanyak sebanyak 200 orang dan terealisasi 200 orang; kegiatan launching Desa Bersih Narkoba "DESA BERSINAR" dengan target peserta sebanyak 100 orang dan teralisasi 100 orang peserta.

1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama. Indicator kinerja untuk mengukur sasaran ini Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama yang disusun. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 berdasarkan rencana kerja tahunan sebesar 4 (empat) Laporan dengan realisasi sebesar 4 (empat) Laporan dengan capaian kinerja 100% (sangat tinggi) yaitu laporan ketahanan pangan; laporan penguatan forum kerukunan umat beragama; laporan data penghayat kepercayaan; dan laporan data kasus narkoba . Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah Laporan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama yang disusun

= 4 Laporan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan EKOSOSBUD

c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sasaran program ini adalah peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social. Dengan indicator kinerja Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social. Realisasi 95% dari target 95% dengan capaian 100% (Sangat tinggi). Adapun formulasi untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah Persentase evaluasi terhadap kewaspadaan nasional dibagi pelaksanaan evaluasi terhadap kewaspadaan nasional yang direncanakan. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan jajaran instansi vertikal TNI, Polri, Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dalam upaya cegah dini untuk menciptakan stabilitas ketentraman dan keamanan dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator kegiatan ini adalah Persentase capaian pelaksanaan pemanapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Dengan realisasi 100% dari target 95% dengan tingkat capaian kinerja 105% (sangat tinggi). Ditahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi FORKOPIMDA sebanyak 4 kali; Rapat koordinasi KOMINDA sebanyak 2 kali; rapat koordinasi tim informan sebanyak 4 kali; serta koordinasi dan pemantauan wilayah di 11 (sebelas) kecamatan dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) ataupun potensi konflik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan ,

keamanan dan ketertiban masyarakat. Formulasi yang digunakan dalam untuk mengukur capaian kinerja kegiatan ini yaitu

Jumlah Kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik yang dilaksanakan	100%
Jumlah Kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	

1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Didaerah

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedia laporan data konflik social dan kewaspadaan dini dengan indicator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah. Terealisasi 4 (empat) laporan dari 4 (empat) laporan yang ditargetkan dengan tingkat capaian 100% (sangat tinggi) yaitu laporan data konflik dan kewaspadaan dini triwulan I sampai triwulan IV. Formulasi sub kegiatan ini sebagai berikut :

Jumlah Laporan konflik social dan kewaspadaan dini didaerah yang disusun tepat waktu
= 4 Laporan Data Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini

1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Didaerah

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan pengawasan dan pemantauan orang asing dengan indicator sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing. Terealisasi 4 (empat) laporan dari 4 (empat) laporan yang ditargetkan dengan tingkat capaian 100% (Sangat Tinggi) yaitu laporan data orang asing

triwulan I sampai triwulan IV. Formulasi sub kegiatan ini sebagai berikut :

Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing yang disusun tepat waktu
= 4 Dokumen

3.2.1.3 ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Perubahan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I terdiri dari 3 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 890.806.240,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 889.765.605,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 99.88%. Sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 0,13%.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis I
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Tar get	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis		Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	80,50%	100%	124%	890.806.240,-	889.765.605	99,88%
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter	95%	100%	105%	151.804.590,-	151.209.010	99,61%
	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan	95%	100%	105%	151.804.590,-	151.209.010	99,61%

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Tar get	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	karakter kebangsaan	n, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan yang disusun	3 Lap	3 Lap	100%	151.804.590,-	151.209.010	99,61%
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95%	100%	105%	308.608.365,-	308.568.310	99,99
	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat	95%	100%	105%	308.608.365,-	308.568.310	99,99

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Tar get	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		beragama						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	4 Lap	4 Lap	100%	308.608.365,-	308.568.310	99,99
	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	95%	95%	100%	430.393.285	429.988.285	99,91%
	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	95%	95%	100%	430.393.285	429.988.285	99,91%

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Tar get	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik didaerah	Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah	4 Lap	4 Lap	100%	404.236.980	403.391.980	99,93%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik didaerah	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4 Lap	4 Lap	100%	26.156.305	26.036.305	99,54

3.2.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara keseluruhan ditahun 2022 capaian kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target indikator kinerja Persentase Konflik Keagamaan yang Terdata dan Terfasilitasi, keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan beberapa SKPD dan instansi terkait;
2. Telah terbentuknya tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kader Bela Negara (FKBN) Tim Informan Kabupaten Luwu Timur, Tim Terpadu Pencegahan, pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.
3. Terjalannya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Luwu Timur dan instansi lainnya dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
4. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Masih terbatasnya jumlah Tim Informan pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur.

2. Heterogenya masyarakat Kabupaten Luwu, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya
3. Permasalahan masih adanya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Luwu Timur yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini
4. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan khususnya anggaran untuk pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk.
5. Belum optimalnya peran kecamatan dalam deteksi dini terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban di daerahnya.
6. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas deteksi dini dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi
2. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat
3. Memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur.
4. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku

5. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah dan
6. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan dengan instansi-instansi terkait.

3.2.1.5. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL / DAERAH LAIN

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dengan standar nasional atau Daerah lain. Akan tetapi karena standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya.

3.2.2. SASARAN STRATEGIS – 2



Sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Politik Masyarakat dengan indicator sasaran yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Local. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan

seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara atau daerah, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu nasional dan local sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

3.2.2.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS II

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Umum” ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal”. Realisasi dan capaian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2022
(dibandingkan target)

Sasaran II	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Umum		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	79,18	80,46	103%

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol 2022

Dari table 3.6 diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dengan

Indikator Sasaran Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal melampaui dari target, ini ditunjukkan dengan realisasi sebesar 80,46% dari target pada tahun ini sebesar 79,18% yang berarti capaian kinerja untuk Indikator ini tercapai 103% (sangat tinggi).

Pencapaian positif indikator sasaran Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal tersebut diperoleh dari formulasi :

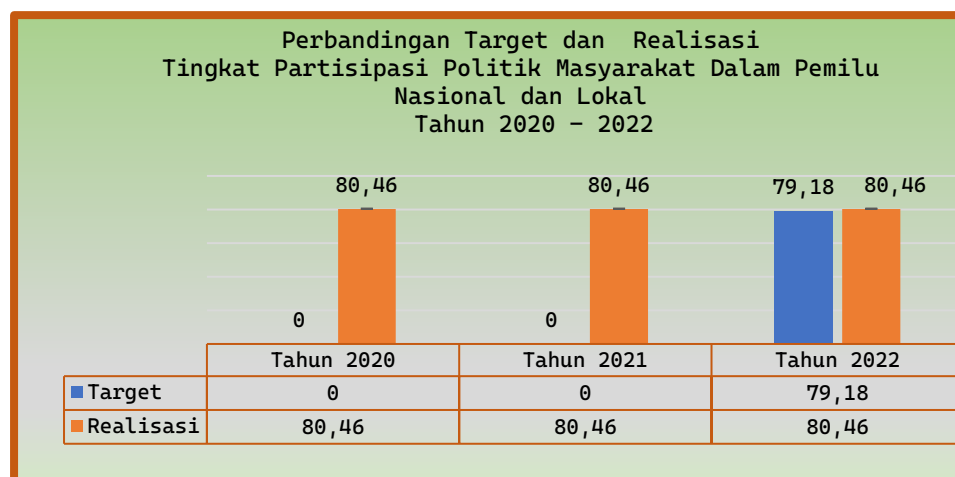
$$\text{Jumlah Suara Sah dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap} \times 100\%$$

3.2.2.2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Tingkat Partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 tidak dapat dilakukan Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan RENSTRA yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ditahun-tahun sebelumnya adalah RENSTRA Tahun 2016–2021 yang SASARAN dan INDIKATOR KINERJANYA yang berbeda. Sedangkan capaian kinerja tahun 2022 telah menggunakan RENSTRA 2021 – 2026 dan hasil capaian untuk tahun 2022 masih menggunakan hasil/data numerik dari KPU Kabupaten Luwu Timur berdasarkan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah pada tahun 2020 yang lalu.

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut

Grafik 3.3



Data partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2020

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	23.964	19.385	153	19.538	81,53
2	Wotu	22.715	18.885	138	19.023	83,75
3	Tomoni	18.380	14.879	121	15.000	81,61
4	Tom-Tim	9.671	8.154	74	8.228	85,08
5	Mangkutana	15.766	12.590	81	12.671	80,37
6	Kalaena	8.745	7.382	50	7.432	84,99
7	Angkona	17.342	14.380	147	14.527	83,77
8	Malili	28.324	22.750	176	22.926	80,94
9	Wasuponda	15.139	11.465	64	11.529	76,15
10	Towuti	28.509	22.394	167	22.561	79,14
11	Nuha	16.305	11.315	74	11.389	69,85
Total		204.860	163.579	1.245	164.824	80,46

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Tahun 2022

Ditahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan Pendidikan dan Budaya Politik yang merupakan syarat utama dalam upaya mewujudkan partisipasi politik. Dalam praktik demokrasi modern, partisipasi politik merupakan salah satu tujuan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi (pembangunan politik) agar sistem politik dapat berjalan secara efektif. Tahun 2022 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dicairkan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai dengan amanat undang-undang dalam rangka membiayai Operasional Sekretariat Partai Politik dan Biaya Pendidikan Politik bagi kader untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran ini, sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Dengan indikator program persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik terealisasi 100% dari target 95% dengan capaian kinerja 105%. Adapun formula indikatornya adalah Jumlah Partai Politik yang Memenuhi Syarat Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik dibagi Jumlah Partai Politik yang Menerima Bantuan Keuangan Partai Politik x 100%.

Pada tahun anggaran 2022 Jumlah partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan bantuan keuangan partai politik dan yang menerima bantuan keuangan berjumlah 10 partai politik.

Tabel 3.8

Data Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik

Tahun 2022

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi di DPRD	Jumlah Anggaran
1.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7 Kursi	153.759.936,-
2.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4 Kursi	104.264.739,-
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4 Kursi	84.389.520,-
4.	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP)	3 Kursi	76.076.037,-
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4 Kursi	68.910.363,-
6.	Partai Demokrat	2 Kursi	53.514.852,-
7.	Partai Hati Nurasi Rakyat (HANURA)	3 Kursi	51.549.171,-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1 Kursi	46.576.881,-
9.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 Kursi	21.622.491,-
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1 Kursi	11.780.145
Total			672.444.135,-

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Tahun 2022

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.

Indikator kegiatan ini adalah Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Target kinerja 95% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 105% - sangat tinggi. Adapun Formula untuk mengukur capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan peningkatan partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan serta etika serta budaya politik yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan peningkatan partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan serta etika serta budaya politik yang direncanakan}} = 100\%$$

1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Pendidikan Politik dan etika budaya politik. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini jumlah pengurus Partai Politik dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ditargetkan 20 (dua puluh) peserta utusan partai politik, terealisasi 19 (sembilan belas) dengan capaian kinerja 95% (sangat tinggi). Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula

$$\frac{\text{Jumlah Pengurus Partai Politik dan yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia}}{\text{Ditargetkan}} = 19 \text{ Orang}$$

1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya verifikasi laporan partai politik. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi. Terealisasi 10 (sepuluh) laporan permohonan bantuan keuangan partai politik dari target 10 laporan dengan capaian kinerja 100% (sangat tinggi). Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula

Jumlah Laporan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diverifikasi tepat waktu
= 10 Laporan

1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pemantauan situasi politik daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah. Ditargetkan 4 (empat) laporan dan teralisasi 4 (empat) laporan yaitu Laporan pemantauan situasi politik di daerah triwulan I – IV, dengan capaian kinerja 100% (sangat tinggi). Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah Laporan pemantauan situasi politik daerah yang disusun tepat waktu
= 4 laporan

b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Dengan indikator program persentase Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi. capaian pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun formula indikatornya adalah Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi di bagi Jumlah ormas yang terdaftar Pada tahun anggaran 2022 Jumlah ormas/LSM/Kelompok Tani/Rumah Ibadah yang terdaftar dan diawasi berjumlah 150 (seratus lima puluh) Ormas/LSM/Kelompok Tani/Rumah Ibadah yang diawasi dan diberdayakan.

Tabel 3.9

Data Ormas/LSM/OKP, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan dan Rumah Ibadah yang Terdaftar Tahun 2022
Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	ORMAS/LSM	OKP	KELOMPOK TANI/NELAYAN	LEMBAGA PENDIDIKAN (TK & YAYASAN)	MASJID	GEREJA	PURA	KET
1	BURAU	0	0	8	0	1	0	0	9
2	WOTU	0	0	33	1	2	0	2	38
3	TOMONI	0	0	5	2	0	0	0	7
4	MANGKUTANA	2	0	0	0	1	3	0	6
5	TOMONI TIMUR	0	0	1	0	4	0	1	6
6	KALAENA	0	0	4	0	0	0	0	4
7	ANGKONA	0	1	6	0	1	2	0	10
8	MALILI	5	1	28	2	5	2	0	43
9	WASUPONDA	0	0	0	0	1	1	0	2
10	TOWUTI	1	0	9	2	7	2	0	21
11	NUHA	2	1	0	0	1	0	0	4
TOTAL		10	3	94	7	23	10	3	150

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Dengan indicator kinerja yaitu persentase jumlah ormas yang terdaftar. Capaian kinerja 100% dari target 100% dan realisasi 100%. Formulasi untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Ormas/LSM/Kelompok Tani/Rumah Ibadah yang dibina}}{\text{Jumlah Ormas/LSM/Kelompok Tani/Rumah Ibadah yang terdaftar}} \times 100\%$$

1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Indicator kinerja untuk mengukur sasaran ini Jumlah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terbit. Ditargetkan 110 (seratus sepuluh) surat keterangan terdaftar yang terbit dan teralisasi 150 (serratus lima puluh) Surat keterangan terdaftar, dengan capaian kinerja 136% (sangat tinggi). Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terbit tepat waktu} \\ &= 150 \text{ Surat Keterangan Terdaftar (SKT)} \end{aligned}$$

3.2.2.3 ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Perubahan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II terdiri dari 2 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 792.953.685,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 792.569.685,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 99.95%. Sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 0,05%.

Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis II
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	79,18%	80,46%	103%	792.953.685	792.569.685	99.95%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95%	100%	105%	752.192.325	751.993.315	99,97%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95%	100%	105%	752.192.325	751.993.315	99,97%

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik							
	Sub Kegiatan Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	20 orang	19 Orang	95%	27.236.350,-	27.041.350	99,28%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	10 Laporan	10 Laporan	100%	698.883.925	698.883.925	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang	Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	26.072.040	26.068.040	99,98%

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik							
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	100%	100%	40.761.370	40.576.370	99,55
	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah SKT yang terbit	95%	100%	105%	40.761.370	40.576.370	99,55
	Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah SKT yang terbit	110 SKT	150 SKT	136%	40.761.370	40.576.370	99,55

3.2.2.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara keseluruhan ditahun 2022 capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target indikator kinerja Persentase Ormas, LSM dan OKP yang aktif, keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa factor :

1. Kerjasama dengan instansi terkait; pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan terkait pendaftaran Ormas dan situasi politik daerah
2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki
3. Memaksimalkan jumlah personil yang ada dalam pembagian wilayah pemantauan dan pelaksanaan kegiatan

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Masih adanya organisasi kemasyarakatan/LSM/Yayasan yang tidak aktif melaporkan kegiatannya baik secara berkala maupun insedentil.
2. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP serta kegiatan Pendidikan politik kepada masyarakat
3. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas pemantauan dilapangan

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan monitoring Ormas, LSM dan OKP;
2. Dilakukan pengusulan permintaan personil dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan ini

3.2.1.5. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL / DAERAH LAIN

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Secara nasional target kinerja untuk capaian tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah 77%. Berdasarkan data numerik dari KPU Kabupaten Luwu Timur capaian partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya melampaui dari target nasional yang ditetapkan yaitu 80,46%.

3.2.3. SASARAN STRAREGIS III



Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan OPD merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SPKD adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pelayanan SKPD ini ditetapkan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

3.2.3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN III

Table 3.11
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran
Strategis III

Sasaran III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	67	Belum Rilis	–

Sumber : Kesbangpol Tahun 2022

Dari tabel 3.11 di atas, untuk capaian indikator Nilai SAKIP tahun 2022 belum ada, karena pemberian nilai pada indikator ini menunggu dilakukannya evaluasi setiap akhir tahun dari Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sehingga data yang akan dijelaskan dalam sasaran indikator ini adalah data capaian tahun 2021 yang hasilnya dirilis ditahun 2022 dan data capaian beberapa tahun terakhir.

3.2.3.2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU

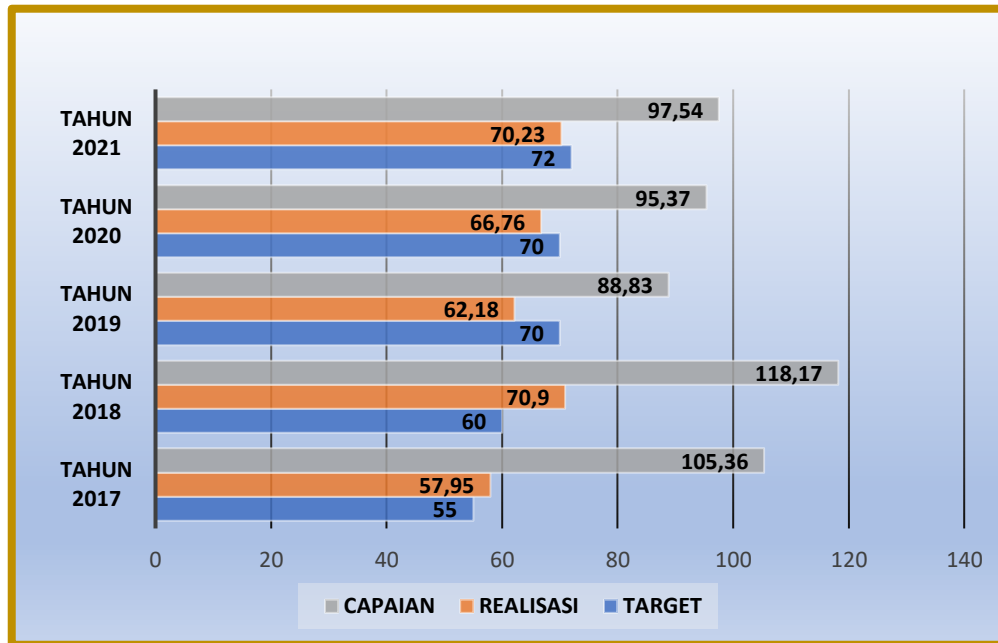
Selanjutnya, perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2017–2022

NO	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP	55	60	70	70	72	67	CC	BB	B	B	BB	–
								57,95	70,9	62,18	66,76	70,23	–
		Capaian Indikator Kinerja (%)											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		105,36		118,17		88,83		95,37		97,54		–	

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.5
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Sasaran III
Tahun 2017 – 2021



Dari tabel 3.12 Dan grafik 3.5 di atas dapat dilihat nilai evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur 2017 – 2021 secara umum menunjukkan perubahan setiap tahun dan predikat yang baik. Pada tahun 2016 sebesar 22, tahun 2017 sebesar 57,95 (naik 35,95 poin dari tahun sebelumnya), kemudian tahun 2018 sebesar 70,90 (naik 12,95 poin dari tahun sebelumnya) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan predikat BB (Sangat Baik), tahun 2019 sebesar 62,18 (turun 8,72 poin dari tahun sebelumnya), ditahun 2020 nilai evaluasi akuntabilitas naik 4,58 poin dari tahun 2019 menjadi 66,76 dengan predikat B (Baik) dan ditahun 2021 Nilai evaluasi akuntabilitas naik 3,47 poin dari tahun 2022 menjadi 70,23 dengan predikat BB (Sangat Baik)

Dari segi capaian kinerja, tingkat capaian kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2017 s/d 2022 secara berturut-turut adalah 100%, 105,36%; 118,17%; 88,83%; 95,37%; 97,54%

Sedangkan untuk tahun 2022, nilai capaian realisasi dan capaian kinerja belum ada, karena menunggu evaluasi dari Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja. Adapun hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur

berdasarkan 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja dari tahun 2017 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13

Perbandingan Nilai SAKIP Kantor Kesbangpol Kab. Luwu Timur
per masing-masing komponen penilaian

Tahun 2017-2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	22	27,29	22,71	23,27	23,52	-
2	Pengukuran Kinerja	11	13,75	11,25	13,75	13,75	-
3	Pelaporan Kinerja	8,3	10,76	9,58	10,7	11,51	-
4	Evaluasi Internal	4	5,27	4,64	4,78	5,,20	-
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	12,65	13,83	14,00	14,25	16,25	-
Jumlah		57,95	70,90	62,18	66,75	70,23	-

Sumber : Kesbangpol Luwu Timur 2022

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran ini sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA

Sasaran program adalah terciptanya system pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk Tahun 2022 adalah sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan

capaian kinerja 100% % dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :

1.1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi yang disusun tepat waktu. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 berdasarkan rencana kerja tahunan adalah 14 Dokumen dengan realisasi sebesar 14 Dokumen (capaian kinerja 100%). Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu

= 14 Dokumen

= 100%

Adapun sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan perangkat daerah yang direncanakan disusun di Tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) dokumen dan terealisasi seluruhnya, yaitu : dokumen Rencana kerja (Renja) Tahun 2023; dan Dokumen Rencana kerja (Renja)-Perubahan Tahun 2022; Sehingga realisasi kinerja sub kegiatan ini 100% dengan capaian kinerja 100% (sangat tinggi)

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di Tahun 2022 merencanakan menyusun 2 dokumen RKA-SKPD dan terealisasi seluruhnya. Dokumen RKA-SKPD yang disusun di Tahun 2021, yaitu : Dokumen RKA Perubahan Tahun 2022; dan Dokumen RKA Pokok Tahun 2023. Sehingga realisasi kinerja sub kegiatan ini 100% dengan capaian

kinerja 100% (Sangat Tinggi)

1.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja perangkat daerah merencanakan menyusun 10 dokumen pada Tahun 2022 dan terealisasi seluruhnya. Dokumen tersebut yaitu :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
2. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur;
3. Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022;
4. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2022;
5. Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022;
6. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022;
7. Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022;
8. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2022;
9. Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022;
10. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2022.

Sehingga realisasi kinerja sub kegiatan ini 100% dengan capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi)

1.2. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran kegiatan adalah tersedianya administrasi keuangan dengan baik. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi kegiatan sebesar 100% capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah dokumen laporan keuangan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun}} = 100\% \\
 & = \frac{18 \text{ Dokumen}}{18 \text{ Dokumen}} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Adapun sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur berjumlah 12 (dua belas) orang dan diberikan gaji dan tunjangan melalui sub kegiatan ini. Sehingga realisasi kinerja sub kegiatan ini 100% dengan capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi).

1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Pada Tahun 2022 laporan keuangan yang direncanakan disusun sebanyak 18 dokumen dan terealisasi seluruhnya, yaitu : Dokumen Laporan Keuangan Bulanan sebanyak 12 (dua belas) dokumen; Dokumen Laporan Keuangan Triwulan sebanyak 4 (empat) dokumen; Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) dokumen; dan laporan Keuangan Kesbangpol Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen. Sehingga realisasi kinerja sub kegiatan ini 100% dengan capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi)

1.3. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen barang milik daerah. Target indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan rencana kerja tahunan perubahan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% (capaian kinerja 100%). Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan formula sebagai berikut :

Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun

100%

Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

= 4 Dokumen / 4 Dokumen x 100%
= 100%

Adapun sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

1.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pada Tahun 2022 laporan penatausahaan barang milik daerah keuangan yang direncanakan disusun sebanyak 4 (empat) dokumen dan terealisasi seluruhnya. Sehingga realisasi kinerja sub kegiatan ini 100% dengan capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi)

1.4. KEGIATAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi terhadap target sebesar 100% (capaian kinerja 100%). Indikator kinerja pencapaian yaitu Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur yaitu :

$$\begin{aligned} &\text{Rata-rata realisasi kinerja administrasi} \\ &\text{kepegawaian perangkat daerah} \quad \text{100\%} \\ &\text{Rata-rata target kinerja administrasi kepegawaian} \\ &\text{perangkat daerah} \\ &= 100\% / 100\% \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

1.4.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan, target 12 (dua belas) dokumen laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan, terealisasi 12 (dua belas) dokumen atau capaian kinerja 100% (sangat tinggi)

1.4.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan direncanakan akan dilaksanakan bagi 4 orang PNS/Upah Jasa dan terealisasi seluruhnya, Sehingga realisasi kinerja sub kegiatan ini 100% (Sangat Tinggi)

1.5. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi umum perangkat daerah. Target kinerja yang ditetapkan untuk kegiatan adalah sebesar 100% dengan realisasi 100% (capaian kinerja 100%). Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{rata-rata realisasi kinerja administrasi umum} \\ & \text{perangkat daerah}}{\text{Rata-rata target kinerja administrasi umum} \\ & \text{perangkat daerah}} = 100\% \\ & = 100\% / 100\% \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Adapun sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor direalisasikan sebanyak 10 jenis dari 10 jenis komponen yang ditargetkan. Sehingga capaian target mencapai 100% (sangat tinggi)

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor direalisasikan sebanyak 17 buah dari 17 buah komponen peralatan yang ditargetkan. Sehingga capaian target mencapai 100% (sangat tinggi)

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dengan target 21 jenis Bahan logistic kantor, direalisasikan 21 Jenis sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi)

1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan pnggandaan yang ditargetkan Tahun 2022 sebanyak 3 jenis, dan terealisasi sebanyak 3 jenis, sehingga diperoleh capaian sebesar 100% (Sangat Tinggi)

1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bahan bacaan yang disediakan berupa koran/surat kabar langganan sebanyak 60 Exemplar yaitu nasional 12 exemplar, regional 24 exemplar dan lokal 24 exemplar. Realisasi yang Tahun 2022 sebanyak 60 eksemplar, sehingga tingkat capaian kinerja diperoleh sebesar 100% (Sangat Tinggi)

1.5.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah tamu yang difasilitasi tahun 2022 ditargetkan 200 orang, terealisasi 200 orang atau capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi)

1.5.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti pada Tahun 2022 sebanyak 470 kali dengan target akhir tahun sebanyak 470 kali. Sehingga diperoleh tingkat capaian realisasi sebesar 100% **(Sangat Tinggi)**.

1.6. KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi kinerja 100% capaian kinerja sebesar 100% **(sangat tinggi)**. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator pencapaiannya yaitu Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dengan formula sebagai berikut :

Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan

Jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan 100%

= 39 Unit/ 39 Unit x 100%
= 100%

Adapun sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator kinerja jumlah mebel yang diadakan. Realisasi sebanyak 23 unit mebel dari 23 unit yang ditargetkan ditahun 2022 atau capaian kinerja 100% **(sangat tinggi)**. Mebel yang diadakan berupa : 1 paket meja front office; 20 Buah Meja Rapat; 1 set sofa tamu; dan 1 buah lemari arsip/filling kabinet

1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin yang diadakan dengan target sebanyak 14 unit dan teralisasi 14 unit atau capaian kinerja 100% (sangat tinggi). Pengadaan tersebut berupa : 1 unit tangga semprot rumput; 1 unit tangga besi; 4 buah papan himbauan; 1 unit mesin pemotong rumput; 4 unit AC; 1 Unit Laptop; 1 paket Aplikasi Data Ormas

1.6.3. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan dengan target sebanyak 2 unit dan terealisasi 2 unit atau capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi). Pengadaan tersebut berupa : 1 paket pembuatan panggung aula kantor; dan 1 paket pembuatan partisi/sekat ruangan kerja.

1.7. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran kegiatan adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, capaian 100% (sangat tinggi). formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sebagai berikut :

rata-rata realisasi kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah

100%

rata-rata realisasi kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah

= 100% / 100% x 100%

= 100%

Adapun sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat menargetkan jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan Tahun 2022 sebanyak 350 surat dan terealisasi sebanyak 350 surat atau capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi)

1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan Tahun 2022 menargetkan 24 rekening dan terealisasi 24 rekening atau 100% (Sangat Tinggi)

1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang dibayarkan upahnya setiap bulan sebanyak 4 (empat) orang. Terealisasi sesuai dengan target, maka capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% (Sangat Tinggi)

1.8. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah. Target kinerja pada kegiatan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, capaian kinerja 100 (Sangat Tinggi). Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan formula sebagai berikut

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang telah dipelihara}}{\text{Jumlah kebutuhan pemeliharaan Barang Milik D}} = 100\% \\ & = 36 \text{ Unit} / 36 \text{ Unit} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Adapun sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sebanyak 4 unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin pada Tahun 2022 terdiri dari Roda Dua sebanyak 3 Unit dan Roda Empat 1 Unit. Dari uraian pelaksanaan kegiatan diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Tinggi)

1.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin lainnya kerja yang dipelihara Tahun 2022 sebanyak 30 Unit dari Target Tahun 2022 sebanyak 30 Unit. sehingga tingkat capaian kinerja kegiatan diperoleh sebesar 100% (Sangat Tinggi)

1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang dilakukan terhadap 1 bangunan yaitu Kantor. adapun pemeliharaan yang dilakukan antara lain: pengecatan, perbaikan instalasi pipa air yang sangat rentan rusak karena debit air yang sangat besar, perbaikan atap. Berdasarkan uraian kegiatan tersebut diperoleh capaian kinerja kegiatan jumlah gedung yang dipelihara sebanyak 1 unit atau capaian sebesar 100% (Sangat Tinggi)

1.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang dilakukan terhadap 1 bangunan yaitu Kantor. adapun pemeliharaan yang dilakukan antara lain: Penataan taman, pengecatan taman, dan

penataan halaman,. Berdasarkan uraian kegiatan tersebut diperoleh capaian kinerja kegiatan jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara sebanyak 1 unit atau capaian sebesar 100% (Sangat Tinggi)

Berdasarkan rincian rencana dan realisasi kegiatan dan sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut

Tabel 3.16

Realisasi Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur Tahun 2022

No	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%
4.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	100%	100%	100%
5.	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%
6.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	100%	100%	100%

No	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	pemerintahan	diadakan			
7.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%
Capaian Kinerja					
Rata-Rata Capaian Kinerja					

3.2.3.3 ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Perubahan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis III terdiri dari 1 Program, 8 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.436.448.914,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.405.345.739,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 98,72%. Sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 1,28%.

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis III
Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi	100%	100%	100%	2.436.448.914	2.405.345.739	98,72

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kabupaten / Kota	perkantoran terpenuhi						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	30.542.125	30.251.925	99,05
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	19.666.600	19.594.400	99,63
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4.873.650	4.803.650	98,56
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	6.001.875	5.853.875	97,53
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu & termanfaatkan	100%	100%	100%	1.565.492.467	1.552.087.807	99,14

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan ya terbayarkan	12 Orang	12 Orang	100%	1.505.599.972	1.494.448.097	99,26
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	59.892.495	57.639.710	96,24
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu & dimanfaatkan	100%	100%	100%	1.804.425	1.796.325	99,55
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1.804.425	1.796.325	99,55
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	62.149.953	60.897.492	97,98

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	28.509.953	28.487.492	99,92
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang	4 orang	100%	33.640.000	32.410.000	96,34
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	401.612.575	401.391.184	99,94
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	100%	8.905.925	8.838.145	99,24
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Buah	17 Buah	100%	2.940.000	2.940.000	100,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	21 jenis	21 jenis	100%	8.181.150	8.168.600	99,85
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	100%	14.840.000	14.838.900	99,99

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	penggandaan	n yang disediakan						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Exsampler	60 Exsampler	100%	6.720.000	6.720.000	100,00
	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	200 orang	200 orang	100%	9.000.000	9.000.000	100,00
	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	470 Kali	470 Kali	100%	351.025.500	350.885.539	99,96
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100%	100%	100%	201.527.369	195.907.369	97,21
	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan / Mesin Lainnya yang diadakan	23 Unit	23 Unit	100%	38.471.369	38.471.369	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang diadakan	14 Unit	14 Unit	100%	138.336.000	133.436.000	96,46
	Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	100%	24.720.000	24.000.000	97,09

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bangunan lainnya	atau Bangunan Lainnya						
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	93.700.000	83.616.097	89,24
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	350 surat	350 surat	100%	1.000.000	1.000.000	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan	24 Rekening	24 Rekening	100%	34.500.000	24.416.097	70,77
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	4 Orang	100%	58.200.000	58.200.000	100,00
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	79.620.000	79.397.540	99,72
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan	4 Unit	4 Unit	100%	32.000.000	31.817.540	99,43

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	dibayarkan pajaknya						
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit	100%	16.980.000	16.950.000	99,82
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	18.640.000	18.640.000	100,00
	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	12.000.000	11.990.000	99,92
TOTAL BELANJA						2.436.448.914	2.405.345.739	

3.2.3.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara keseluruhan dari tahun ke tahun capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD menunjukan predikat baik, hal ini disebabkan beberapa factor :

1. Badan Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen

- perencanaan jangka menengah periode 2021–2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
2. Telah disusun RKT, Perjanjian dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra;
 3. Pemberdayaan SDM / Aparatur yang cukup maksimal sehingga mendukung kelancaran operasional kantor.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Kurangnya SDM/Aparatur yang kompeten dibidangnya;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
3. Belum optimalnya penyusunan perjanjian kinerja sampai ke tingkat staf/pelaksana
4. Monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja yang belum berjalan dengan baik

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian kinerja sampai jenjang staf dan menyusun indikator kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atau triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya;
3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
4. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2.1.5. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL / DAERAH LAIN

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara tingkat capaian Badan KESBANGPOL Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2021, dimana Badan KESBANGPOL Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan nilai 67,87 dengan Predikat B, sementara Badan KESBANGPOL Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 70,23 dengan Predikat BB. Nilai SAKIP antara Badan KESBANGPOL Kabupaten Luwu Timur dan Badan KESBANGPOL Kota Pare-Pare terdapat selisih nilai sebesar 2.36. Namun Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur masih harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP-nya dimasa yang akan datang.

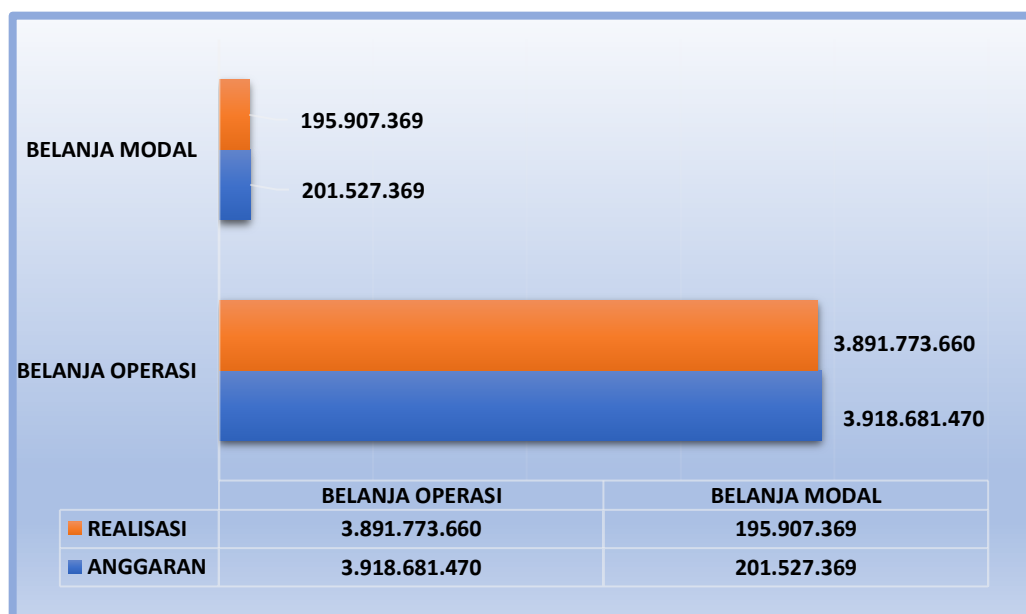
3.2. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4.120.208.839,-, (*Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.918.681.470,- dan belanja modal sebesar Rp. 201.527.369,-. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2022 sebesar Rp. 4.087.681.029,- (99,21%) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.891.773.660,- (99,31 %) sedangkan realisasi belanja Modal sebesar Rp. 195.907.369 (97,921 %). Jumlah total realisasi belanja operasi dan belanja modal per Desember 2021 sebesar Rp. 3.348.083.314 atau 89,34%. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 3.18
Pagu Dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022

No	BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1.	Belanja Operasi	3.918.681.470	3.891.773.660	99,31
	Belanja Pegawai	1.535.599.972	1.522.198.097	99,12
	Belanja Barang dan Jasa	1.610.637.363	1.597.131.428	99,16
	Belanja Hibah	772.444.135	772.444.135	100
2.	Belanja Modal	201.527.369	195.907.369	97,21
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.807.369	156.907.369	96,97
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	24.720.000	24.000.000	100
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000	15.000.000	100
Total		4.120.208.839,-	4.087.681.029,-	99,21

Grafik 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2022



Tabel 3. 19
Realisasi Keuangan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	2.436.448.914	2.405.345.739	98,72		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.542.125	30.251.925	99,05		
1.	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	19.666.600	19.594.400	99,63		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4.873.650	4.803.650	98,56		
3.	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	6.001.875	5.853.875	97,53		
2.	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	1.565.492.467	1.552.087.807	99,14		
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.505.599.972	1.494.448.097	99,26		
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	59.892.495	57.639.710	96,24		
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.804.425	1.796.325	99,55		
1.	Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1.804.425	1.796.325	99,55		
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.149.953	60.897.492	97,98		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28.509.953	28.487.492	99,92		
2.	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	33.640.000	32.410.000	96,34		
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	401.612.575	401.391.184	99,94		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8.905.925	8.838.145	99,24		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.940.000	2.940.000	100,00		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	8.181.150	8.168.600	99,85		
4.	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.840.000	14.838.900	99,99		
5.	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.720.000	6.720.000	100,00		
6.	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	9.000.000	9.000.000	100,00		
7.	Sub Kegiatan Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	351.025.500	350.885.539	99,96		
6.	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	201.527.369	195.907.369	97,21		
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	38.471.369	38.471.369	100,00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.336.000	133.436.000	96,46		
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	24.720.000	24.000.000	97,09		
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	93.700.000	83.616.097	89,24		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.500.000	24.416.097	70,77		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	58.200.000	58.200.000	100,00		
8.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	79.620.000	79.397.540	99,72		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	32.000.000	31.817.540	99,43		
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	16.980.000	16.950.000	99,82		
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	18.640.000	18.640.000	100,00		
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	12.000.000	11.990.000	99,92		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kantor atau bangunan lainnya					
02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	151.804.590	151.209.010	99,61		
1.	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	151.804.590	151.209.010	99,61		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	151.804.590	151.209.010	99,61		
03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	752.192.315	751.993.315	99,97		
1.	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	752.192.315	751.993.315	99,97		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sub Kegiatan Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	27.236.350	27.041.350	99,28		
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	698.883.925	698.883.925	100,00		
3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	26.072.040	26.068.040	99,98		
04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	40.761.370	40.576.370	99,55		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	40.761.370	40.576.370	99,55		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	40.761.370	40.576.370	99,55		
05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	308.608.365	308.568.310	99,99		
1.	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	308.608.365	308.568.310	99,99		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	308.608.365	308.568.310	99,99		
06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	430.393.285	429.988.285	99,91		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	430.393.285	429.988.285	99,91		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	404.236.980	403.951.980	99,93		
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	26.156.305	26.036.305	99,54		
TOTAL BELANJA		4.120.208.839	4.087.681.029	99,21		

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan RENSTRA tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum hasil analisis pencapaian indicator kinerja terhadap 2 (dua) sasaran, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan; kecuali sasaran “Meningkatnya kinerja OPD” yang masih menunggu hasil penilaian dari tim inspektorat Kab. Luwu Timur,

sehingga yang dijelaskan pada sasaran kinerja tersebut hanya hasil pada tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir

2. Dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan, tingkat capaian realisasi keuangan tahun 2022 sebesar Rp. 4.087.681.029,- atau 99,21%. Dalam pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 0,79% atau secara absolute sebesar Rp. 32.527.810,-

4.2. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan/Sub Kegiatan tahun selanjutnya;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
5. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.